

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keragaman Islam yang ada saat ini memunculkan fenomena baru salah satunya di Nigeria sebuah negara yang berada di benua Afrika. fenomena baru tersebut menyebabkan munculnya aktor-aktor yang ingin memperjuangkan hak-haknya dalam menerapkan syariat Islam. Aktor gerakan Islam tersebut menuntut dilaksanakannya hukum Islam secara penuh di berbagai negara bagian di Nigeria. Aktor gerakan Islam tersebut dikenal dengan nama resmi *Jama'at Ahl as-Sunnah lid-da'wa wal-Jihad* atau dikenal dengan sebutan *Boko Haram*.

Selain oleh keragaman Islam, gejala sosial yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Nigeria serta lemahnya keamanan pada wilayah perbatasan memungkinkan terjadinya penetrasi dari sesame masyarakat suku Kanuri yang tinggal di negara tetangga, seperti Chad, Kamerun dan Niger untuk masuk ke wilayah negara Nigeria. Suku Kanuri melakukan ekspansi ke Nigeria dengan alasan untuk membantu sesame anggota suku dan melalui pertalian hubungan suku tersebut, maka terjadi perdagangan senjata dan transaksi penyelundupan barang-barang yang dapat memfasilitasi terbentuknya sebuah gerakan yang bernama Boko Haram (Forest J. J., 2012).

*Jemaat Sunnah untuk Dakwah dan Jihad* (bahasa Arab: *Jama'at Ahl as-Sunnah lid-da'wa wal-Jihad*)- atau lebih dikenal dengan nama Boko Haram yang dalam bahasa Hausa berarti “Pendidikan Barat Haram”) (Jatmika, 2016, p. 111) - adalah organisasi militan Islam yang bermarkas di Nigeria timur laut, Kamerun utara, dan Niger. Kelompok ini berpengaruh di negara bagian Borno, Adamawa, Kaduna, Bauchi, Yobe, dan Kano. di wilayah-wilayah tersebut, keadaan darurat telah dinyatakan. Boko Haram tidak memiliki struktur atau rantai komando yang jelas dan bersifat “menyebar” dengan “struktur seperti sel” yang memfasilitasi keberadaan faksi-faksi. Kelompok ini dilaporkan memiliki tiga faksi

dengan kelompok pecahan yang dijuluki Ansaru. Pemimpin utama Boko Haram saat ini adalah Abubakar Shekau (Jatmika, 2016).

Boko Haram yang didirikan pada tahun 2002 oleh Muhammed Yusuf di Maidiguri ini memiliki tujuan untuk mendirikan negara Islam “murni” berdasarkan hukum syariah dan menghentikan hal-hal yang dianggap sebagai “Westernisasi” (Jatmika, 2016). Banyak anggota senior ini yang terinspirasi oleh Maitatsine (pengkhotbah di Kano, Nigeria Utara). Kelompok ini juga diyakini termotivasi oleh sengketa antar-etnis karena pendiri organisasi ini percaya bahwa sedang terjadi “pembersihan etnis” terhadap suku Hausa dan Fulani.

Muhammed Yusuf sebagai pendiri gerakan ini juga mendirikan kompleks religius termasuk sebuah masjid dan sebuah sekolah Islam. Banyak keluarga Muslim yang miskin dari seluruh Nigeria, dan juga negara-negara tetangga, mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah tersebut. Tetapi Boko Haram tidak hanya tertarik pada pendidikan. Tujuan politiknya adalah menciptakan negara Islam, dan sekolah tersebut menjadi tempat rekrutmen bagi para jihadis (Banjo, 2015)

Sejak awal terbentuknya, Boko Haram merupakan sebuah kelompok dakwah yang menggunakan jalan nirkekerasan. Mereka lantang menyuarakan akan kegagalan pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat di daerah tersebut, korupnya pemerintah Nigeria, serta tingginya angka pengangguran. Namun dalam rentang waktu tersebut mereka mengalami berbagai perubahan hingga akhirnya menjadi sebuah kelompok teroris.

Boko haram mulai melirik cara yang lebih radikal untuk mengekspresikan dan menyuarakan cita-citanya untuk membangun suatu pemerintahan yang berdasarkan pada syariat Islam. Pada perkembangannya, demi melancarkan cita-citanya, boko haram banyak melakukan tindak kejahatan perang terhadap penduduk sipil yang sangat bertentangan dengan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II

dimana aksi-aksi dari boko haram juga telah menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan perdamaian dunia. Menurut Human Right Watch, selama periode 2009-2012 kelompok Boko Haram telah bertanggung jawab atas 900 tindakan kekerasan di wilayah Afrika dan selama 2009-2015 jumlah korban sekitar 10.000 orang dan hampir setengah juta penduduk Nigeria menjadi pengungsi. Aksi pemberontakan Boko Haram semakin meningkat pada tahun 2014 dengan adanya aksi penculikan kurang lebih 276 siswi sekolah dikota Chibok. Para siswi yang telah diculik dan dikabarkan akan dijual dan dijadikan tentara perang oleh Boko Haram. (Annisa, 2016)

Selama lima tahun terakhir kelompok Boko Haram juga telah mengobarkan perlawanan terhadap pemerintah demi cita-citanya untuk mendirikan negara Islam dan kekuatan dari Boko Haram semakin bertambah. Meskipun kelompok tersebut tidak pernah membuat laporan independen seberapa besar kekuatan yang di miliki, akan tetapi dapat dilakukan dengan membandingkan kekuatan Boko Haram dengan kelompok lain seperti ISIS dan Al- Qaeda. Para pakar internasional memperkirakan jumlah anggota aktif Boko Haram saat ini yaitu 5.000 sampai dengan 50.000 orang. *“Local and international experts put the number at anywhere between 5,000 and 50,000 active fighters. This latter figure is almost certainly far too big”* (Dorrie, 2015). Perubahan ini menunjukkan adanya akumulasi yang semakin bertambah mengenai kisah perlawanan politik dan gerakan-gerakan penentangan terhadap para pemegang kekuasaan yang dianggap otoriter dan represif di berbagai penjuru dunia. Para ahli umumnya bersepakat bahwa dalam beberapa dekade terakhir, variasi, frekuensi dan intensitas gerakan dan perlawanan politik semakin bertambah kompleks. Gerakan-gerakan tersebut sering berhasil, tetapi jika gagal, aksi-aksi mereka mampu mempengaruhi perubahan politik, kultural, dan bahkan internasional (Suharko, 2006, pp. V-Vi).

Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok Boko Haram tentu saja telah meresahkan bagi pemerintah Nigeria dan

mengacaukan sistem yang ada. Tidak hanya dapat menimbulkan ancaman keamanan bagi internal Nigeria, tetapi juga mengancam stabilitas secara keseluruhan di regional Afrika (Chairunnisa, 2016). Ketidakmampuan pemerintah dalam merespon secara efektif ketika menghadapi guncangan dan banyak pihak yang mengecam pemerintah Nigeria yang dianggap lamban dalam menghadapi Boko Haram, sehingga pemerintah Nigeria harus melakukan kerjasama dalam menangani kelompok Boko Haram di negaranya. Ketidakmampuan pemerintah Nigeria dalam menghadapi Boko Haram diungkapkan dalam sebuah laporan Amnesty Internasional yang mengungkapkan bahwa, pasukan keamanan dan kesatuan khusus pemerintah menangkap banyak warga tanpa tuduhan yang jelas. Hukuman mati juga kerap tidak di proses oleh pengadilan. Yahya Shinku, bekas mayor militer Nigeria juga mengungkapkan “Bahkan setelah serangan terjadi, tidak ada pelaku yang diajukan ke pengadilan. Tidak ada yang tau apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah” (Sadner, 2012).

Hal ini kemudian mengundang reaksi dari organisasi regional Afrika, yaitu Uni Afrika yang menciptakan stabilitas dan perdamaian di Afrika. Kegiatan Boko Haram yang menjadi ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan kawasan Afrika menjadikan Uni Afrika mengambil langkah-langkah bersama untuk menangani berbagai ancaman yang di sebabkan oleh Boko Haram.

Uni Afrika, disingkat UA (bahasa Inggris: *African Union*, disingkat AU) merupakan organisasi internasional untuk wilayah regional Afrika yang dibentuk pada 9 Juli 2002 di Durban, Afrika Selatan. Uni Afrika dibentuk sebagai penerus Organisasi Kesatuan Afrika (OAU) (Jatmika, Hubungan Internasional di Kawasan Afrika, 2016) merupakan organisasi yang bertujuan untuk memperkuat integrasi antar negara-negara Afrika, memperkuat suara Afrika di kancah internasional, menyatukan seluruh negara di kawasan Afrika

dalam rangka menyelesaikan berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik negara-negara anggotanya.<sup>1</sup>

Uni Afrika telah berperan penting dalam menghentikan konflik Boko Haram yang terjadi di Nigeria, terutama sejak tahun 2009 saat Boko Haram melakukan aksi terror terhadap pemerintah dan masyarakat Nigeria. Masuknya Uni Afrika dalam menangani Boko Haram ini dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal merupakan faktor yang secara langsung berasal dari komitmen Uni Afrika sendiri untuk terlibat dalam penyelesaian konflik di negara-negara anggotanya melalui mekanisme dan penyelesaian konflik yang dimiliki Uni Afrika. Sedangkan faktor eksternal berasal dari beberapa pihak internasional (PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat, Perancis, dll) yang terus mendorong Uni Afrika untuk dapat mengatasi masalah dihadapi bangsa Afrika dan untuk mencapai tujuannya (Chairunnisa, Peran Uni Afrika dalam Menangani Kelompok Militan Boko Haram di Nigeria, 2016).

Di dalam organisasi regional Uni Afrika terdapat dua badan yang berkaitan dengan masalah perdamaian dan keamanan. Pertama, *The Assembly* (Majelis Umum) yang merupakan badan tertinggi Uni Afrika bertugas untuk memutuskan sebuah intervensi negara anggota apabila negara anggota tersebut menginginkan intervensi dari Uni Afrika (Forest J. J., 2012). Kedua, Badan Keamanan dan Perdamaian Uni Afrika (*Peace and Security Council African Union*) merupakan badan yang menangani masalah keamanan di Uni Afrika dan bertugas untuk melakukan respon terhadap segala kasus ancaman keamanan nasional. Tujuan dasar dari Badan Keamanan dan Perdamaian Uni Afrika ini adalah melakukan pengiriman Pasukan Perdamaian PBB, dan intervensi kemanusiaan guna mencegah terjadinya genosida, kejahatan perang, serta kejahatan terhadap kemanusiaan. (Chairunnisa, Peran Uni Afrika dalam Menangani Kelompok Militan Boko Haram di Nigeria, 2016)

---

<sup>1</sup> African Union. Status Integration of Africa (SIA IV) hal. 2

*The Assembly* (Sidang Umum) merupakan Badan tertinggi Uni Afrika yang merupakan dasar dan yang bertanggung jawab dalam memutuskan intervensi Uni Afrika terhadap suatu permasalahan yang ada di wilayah regional Afrika. Majelis yang dibentuk pada 25 Mei 1963 ini awalnya memiliki 32 negara anggota independen yang terdiri dari Kepala Negara dan pemerintah dari semua negara anggota Uni. Saat ini *The Assembly* memiliki 54 negara anggota.

Melalui intervensi yang dilakukan oleh Uni Afrika tersebut tentunya memberikan dampak bagi kelompok Boko Haram dan warga negara Nigeria, meskipun dampak tersebut belum dapat dirasakan secara signifikan oleh warga Nigeria. Akan tetapi intervensi Uni Afrika telah menyebabkan Boko Haram banyak kehilangan wilayah kekuasaannya dan mendorong kelompok tersebut untuk membuat strategi baru seperti melakukan bom bunuh diri.

Melihat peristiwa tersebut, penelitian ini akan berfokus pada upaya Uni Afrika dalam menangani konflik Boko Haram di Nigeria. Penulis ini memaparkan bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh organisasi regional Uni Afrika dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di negaranya dengan menggunakan teori dan konsep yang dapat digunakan dalam menganalisis permasalahan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah:

**Bagaimana Upaya Uni Afrika dalam menangani Dampak Kelompok Boko Haram di Nigeria Tahun 2009-2015 ?**

## **C. Kerangka Pemikiran Konsep Intervensi**

Intervensi merupakan salah satu bentuk campur tangan dalam urusan negara lain yang bersifat diktatorial, dimana hal tersebut dilakukan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional (Sastromidjojo, 1971).

Intervensi dalam arti luas sebagai segala bentuk campur tangan negara asing dalam urusan satu negara. Intervensi dalam arti sempit yaitu suatu campur tangan negara asing terhadap urusan negara lain yang bersifat menekan dengan kekerasan (force) atau dengan ancaman akan melakukan kekerasan, apabila keinginannya tidak terpenuhi (Prodjodikoro, 1967).

Sementara itu Oppenheim Lauterpacht mengatakan bahwa intervensi sebagai campur tangan secara diktator oleh suatu negara terhadap urusan dalam negeri lainnya dengan maksud baik untuk memelihara atau mengubah keadaan, situasi atau barang di negeri tersebut (Adolf, 2002). Sedangkan pengertian intervensi menurut K.J Holsti yaitu tindakan radikal terhadap negara lain tanpa adanya izin dari pemerintah yang berkuasa melalui tindakan yang dapat berupa campur tangan diplomatik, memamerkan kekuatan, atau pemberontakan. Campur tangan dalam urusan internal negara berdaulat adalah norma dasar dari hukum internasional. Intervensi mengacu pada tindakan eksternal yang mempengaruhi urusan dalam negara lain yang berdaulat (Holsti, 1988). Sehingga dapat dikatakan bahwa intervensi merupakan suatu tindakan campur tangan yang dilakukan oleh suatu negara terhadap urusan negara lain melalui cara-cara yang dapat bersifat negosiasi ataupun militer dengan maksud menyelesaikan suatu masalah.

Dalam Black's Law Dictionary, intervensi diartikan sebagai turut campurnya sebuah negara dalam urusan dalam negeri negara lain atau dalam urusan dengan negara lain dengan menggunakan kekuatan atau ancaman kekuatan (A. Garner, 1999). Adapun Intervensi menurut Bikhu Parekh yakni upaya untuk ikut campur dalam urusan negara lain dengan tujuan untuk mengakhiri penderitaan fisik yang diakibatkan oleh disintegrasi atau penyalahgunaan kekuasaan dari suatu negara dan membantu menciptakan struktur pemerintah sipil yang aman dan stabil. Oleh karenanya alasan pencegahan dari adanya penderitaan fisik atau kemunculan korban yang meluas yang disebabkan oleh penyalahgunaan

kekuasaan bentuk intervensi menjadi sebab yang dibenarkan untuk dilakukan (Chang, 2011).

Sedangkan Intervensi Militer diartikan sebagai suatu campur tangan yang koersif di dalam suatu negara yang berdaulat dengan tujuan untuk melindungi atau memberi kebebasan kepada individu yang mengalami penindasan atau genosida (Pugh, 1997). Intervensi militer didefinisikan secara operasional sebagai pergerakan pasukan-pasukan atau kekuatan-kekuatan (pasukan udara, laut, darat dll) di dalam suatu negara dengan konteks beberapa isu politik atau kekacauan (Pearson & Baumann, 1993). Sedangkan berdasarkan kamus Oxford, Intervensi militer didefinisikan sebagai suatu tindakan sengaja yang dilakukan oleh suatu negara atau sekelompok negara dengan tujuan untuk memperkenalkan pasukan militernya ke dalam sebuah negara yang demokrasi.

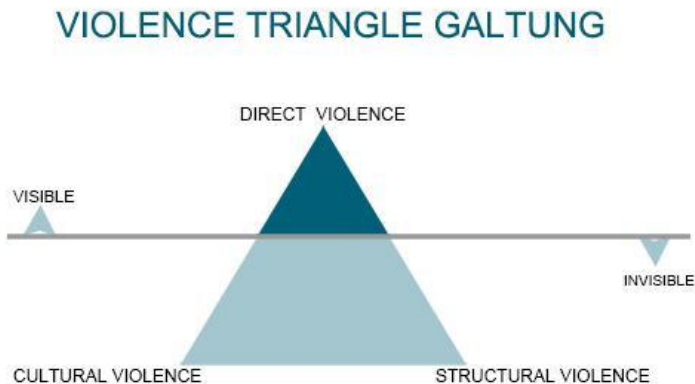
Menggunakan konsep *Intervensi Militer* Uni Afrika membentuk *Multinational Joint Task Force* (MNJTF) untuk menangani konflik Boko Haram di Nigeria. Dimana Uni Afrika menggunakan acuan beberapa pendekatan dalam penyelesaian konflik yang dikemukakan oleh **Johan Galtung**.

Salah satu teori perdamaian yang dijadikan sebagai landasan bagi penulis adalah yang diperkenalkan oleh Johan Galtung tahun 1976. Konsep perdamaian “peacebuilding” yang diperkenalkan oleh Johan Galtung ditulis dalam sebuah artikel yang berjudul *Three Approaches to Peace : Peacekeeping, Peacemaking, and Peacebuilding*. Dalam artikel ini, Galtung mengungkapkan bahwa “perdamaian memiliki struktur yang berbeda ketika konflik, dimana dalam struktur tersebut harus menghilangkan setiap benih konflik baru baik itu struktur pemerintahan maupun masyarakat. Lebih khususnya, struktur yang menjadi penyebab dasar konflik harus dihilangkan dan memberikan dukungan dalam upaya mengelola perdamaian serta penyelesaian konflik (Galtung, *Essay in Peace Research: Peace, war and defense*, Volume 2, 1976).



Secara umum, konflik hanya dapat dilihat pada permukaan saja, seperti jumlah korban atau bagaimana cara kedua belah pihak yang berkonflik berkonfrontasi secara langsung. Oleh karena itu, dibutuhkan pemetaan untuk mengetahui pihak-pihak yang berkonflik serta hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya konflik (Miall, Ramsbotham, & Woodhouse, 2000). Galtung telah menunjukkan beberapa cara berbeda untuk mengklasifikasikan fenomena kekerasan yang melatarbelakangi terjadinya konflik. Kekerasan tersebut dirangkum dalam tiga jenis: (1) pribadi atau langsung, (2) struktural atau tidak langsung, dan (3) budaya atau simbolis (Galtung, Violence, Peace and Peace Research, 1969).

**Gambar 1.1 Segitiga Konflik Johan Galtung**



Johan Galtung mengatakan bahwa ketiga jenis kekerasan dapat diwakili oleh tiga sudut segitiga kekerasan. Segitiga tersebut dimaksudkan untuk menekankan bahwa ketiga jenis hal itu saling terhubung satu sama lain. Johan Galtung, membuat perbedaan yang jelas antara Kekerasan Struktural, Kekerasan Budaya dan Kekerasan Langsung. Ide ini terkait dengan perbedaannya tergantung pada bagaimana ia beroperasi antara tiga bentuk kekerasan yang saling berkaitan (Struktural-Budaya-Langsung) di mana Kekerasan Struktural berada di ujung kiri dan Kekerasan

Budaya berada di ujung kanan dari dasar Segitiga tidak terlihat sementara kekerasan langsung ada di titik puncak.

Menurut Segitiga Kekerasan Galtung (1969), Kekerasan Budaya dan Struktural menyebabkan Kekerasan Langsung. Kekerasan langsung memperkuat kekerasan Struktural dan Budaya. Kekerasan Langsung, Fisik dan / atau verbal, terlihat sebagai perilaku dalam segitiga. Namun, aksi ini tidak muncul begitu saja, akarnya bersifat kultural dan struktural.

Kekerasan langsung bisa dalam berbagai bentuk. Dalam bentuk klasiknya, ini melibatkan penggunaan kekuatan fisik, seperti pembunuhan atau penyiksaan, perkosaan dan kekerasan seksual, dan pemukulan. Lebih lanjut, kami memahami bahwa kekerasan verbal, seperti penghinaan atau merendahkan, juga semakin dikenal luas sebagai kekerasan. Johan Galtung, lebih lanjut, menggambarkan kekerasan langsung sebagai “kerusakan yang dapat dihindari dari kebutuhan atau kehidupan manusia yang mendasar yang membuat mustahil atau sulit bagi orang untuk memenuhi kebutuhan mereka atau mencapai potensi penuh mereka. Ancaman untuk menggunakan kekerasan juga diakui sebagai kekerasan.”

Kekerasan budaya adalah sikap dan keyakinan yang berlaku bahwa kita telah diajarkan sejak kecil dan yang mengelilingi kita dalam kehidupan sehari-hari tentang kekuatan dan kebutuhan kekerasan. Kita dapat mempertimbangkan contoh penceritaan sejarah yang mengagungkan catatan dan melaporkan perang dan kemenangan militer daripada gejolak non-kekerasan, gerakan, pemberontakan, atau kemenangan koneksi dan kolaborasi orang-orang. Hampir semua budaya mengakui bahwa membunuh seseorang adalah pembunuhan, tetapi membunuh puluhan, ratusan, atau ribuan selama konflik yang dinyatakan disebut 'perang' atau pembunuhan orang yang tidak bersalah oleh pasukan keamanan sering dinyatakan sebagai terperangkap dalam baku tembak.

Kekerasan struktural terjadi ketika beberapa kelompok, kelas, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan lainnya diasumsikan memiliki. Dan kenyataannya memang memiliki,

lebih banyak akses ke barang, sumber daya, dan peluang daripada kelompok lain, kelas, jenis kelamin, kebangsaan, dll, dan keuntungan yang tidak setara ini dibangun ke dalam sistem sosial, politik dan ekonomi yang mengatur masyarakat, negara dan dunia. Kecenderungan-kecenderungan ini mungkin terang-terangan seperti Apartheid atau lebih halus seperti tradisi atau kecenderungan untuk memberikan beberapa kelompok hak istimewa atas yang lain. Hak konstitusional pemesanan pekerjaan dan dukungan keuangan atas nama kesejahteraan "suku atau mundur" dan undang-undang pertanahan yang tidak seragam, yang melarang satu kelompok untuk memiliki properti yang mendarat di tanah mereka sendiri sementara kelompok lain bebas untuk memiliki properti yang didaratkan dimanapun yang mereka inginkan juga merupakan contoh kekerasan struktural.

Berdasarkan analisis konflik yang diklasifikasikan menggunakan segitiga konflik, kemudian **Johan Galtung** mengemukakan tiga pendekatan yang harus dilakukan dalam penyelesaian konflik, yaitu

1) **Peacekeeping** (*The Associative Approach*)

Merupakan proses menghentikan atau mengurangi intervensi militer yang menjaga peran sebagai penjaga perdamaian netral. Menurut PBB, penjagaan perdamaian atau peacekeeping adalah sebuah instrument yang unik dan dinamis yang dikembangkan oleh organisasi sebagai cara untuk membantu negara-negara yang terkoyak oleh konflik, dan menciptakan kondisi untuk perdamaian abadi.

Dalam hal ini Uni Afrika melakukan intervensi militer dalam usahanya untuk menghentikan konflik yang disebabkan oleh Boko Haram di Nigeria. Karena Uni Afrika membentuk *Multinational Joint Task Force* (MNJTF). Dalam intervensi militer Uni Afrika ke konflik Boko Haram menggunakan Peacekeeping sebagai garda terdepan untuk menyelesaikan konflik ini yaitu *Multinational Joint Task Force* (MNJTF). Pasukan khusus ini terdiri dari lima negara Afrika Barat,

yakni Nigeria, Kamerun, Niger, Chad, dan Benin yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, mengembalikan otoritas negara dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan di daerah bencana.

*Multinational Joint Task Force* (MNJTF) memiliki tugas yang spesifik yaitu melakukan operasi militer, melakukan patroli di perbatasan, menemukan korban penculikan, menghentikan aliran atau pedistribusian senjata, reintegrasi pemberontak ke dalam masyarakat dan menangkap para pemberontak yang bertanggung jawab atas kejahatan ke pengadilan. Selain itu, MNJTF juga diberikan mandat untuk mencegah terjadinya perluasan wilayah kekuasaan Boko Haram

## 2) **Peacemaking** (*The Conflict Resolution Approach*)

Hal ini adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengakhiri konflik Internal dengan bmenitik beratkan pada penggunaan cara-cara diplomatik dan membujuk setiap pihak yang bertikai untuk mencapai kesepakatan damai secara sukarela.

Dikaitkan dengan kasus ini pihak – pihak yang bersengketa dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang berunding.

## 3) **Peacebuilding** (*The Dissociative Approach*)

Adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang abadi. Melalui proses peace-building, diharapkan *negative peace* (adanya kekerasan) berubah menjadi *positive peace* (tidak adanya kekerasan) dimana masyarakat tidak akan lagi mendapat kekerasan dalam jangka panjang dan

merasakan adanya keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif.

Dalam kasus ini, Uni Afrika memberikan bantuan sosial bagi para korban Boko Haram dalam bentuk perlindungan dan bantuan terhadap para pengungsi dengan melakukan kerjasama bersama beberapa negara tetangga seperti Chad, Kamerun, dan Niger. Selain itu, Uni Afrika juga memberikan bantuan dalam mendistribusikan dana yang diperoleh dari para donator yang berasal dari organisasi-organisasi internasional seperti UNHCR dan ICRC.

#### **D. Hipotesa**

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sementara bahwa upaya Uni Afrika dalam menangani kelompok Boko Haram di Nigeria adalah :

1. Uni Afrika melakukan upaya dalam bidang militer dengan membentuk pasukan khusus yang bernama *Multinational Joint Task Force* (MNTJF) untuk menghadapi Boko Haram
2. Dalam bidang sosial dan ekonomi, Uni Afrika memberikan perlindungan dan bantuan kepada para pengungsi yang menjadi korban kekerasan, dengan bekerjasama bersama dengan UNHCR dan ICRC.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memaparkan bagaimana upaya yang dilakukan Uni Afrika sebagai organisasi internasional bagi kawasan regional Afrika dalam menangani konflik oleh Boko Haram di Nigeria. Selain itu, untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Uni Afrika dalam menangani konflik Boko Haram di Nigeria dalam rentan waktu antara 2009 – 2015.

Adapun hal yang tidak kalah penting, penelitian ini juga bertujuan untuk mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh

selama proses perkuliahan dengan menganalisis teori dengan fenomena yang ada, sehingga nantinya dapat bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Hubungan Internasional.

#### **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui upaya Uni Afrika sebagai organisasi regional dalam menangani kelompok Boko Haram di Nigeria, Afrika. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2007:4) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

#### **G. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penulisan dalam sebuah penelitian sangat di perlukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembahasan, dan juga untuk membantu pembuktian terhadap hipotesa dan pokok permasalahan yang telah ditentukan. Lebih jauh lagi, pembatasan dalam sebuah penelitian dimaksudkan agar objek penelitian lebih jelas dan spesifik, sehingga permasalahan dan kajian tidak keluar dari wacana yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi kajian pada upaya Uni Afrika dalam menangani Boko Haram di

Nigeria. Jadi, batas penelitian yang dilakukan penulis hanya sebatas upaya Uni Afrika dalam menangani Boko Haram di Nigeria tahun 2009-2015.

## **H. Rencana Sistematika Penulisan**

Dalam karya tulis ini, penulis membagi ke dalam beberapa bab guna untuk mempermudah penyusunan bahasa dan uraian-uraian. Sistematika penulisan yang akan dijabarkan dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Pada bab ini penulis akan menjelaskan Uni Afrika sebagai organisasi regional kawasan Afrika

Bab III: Pada bab ini penulis akan membahas mengenai sejarah Boko Haram, ancaman Boko Haram dan ketidakmampuan pemerintah Nigeria dalam menangani Boko Haram.

Bab IV: Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai upaya yang dilakukan Uni Afrika dalam menangani kelompok Boko Haram.

Bab V : Bab ini berisi penutup/kesimpulan.